

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 18

# DPD Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan

**MUGASSARI** - Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Gafar Usman, meminta pemerintah kabupaten/kota di Jateng untuk melakukan perbaikan, bekerja sama, berkomunikasi, dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam persoalan pengelolaan aset.

"Dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang sudah menyampaikan komitmennya, sudah ada 21 pemkab/pemkot yang pengelolaan keuangannya berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Jumlah ini meningkat

dari sebelumnya yang hanya 16 kabupaten kota. Raihan WTP tersebut dicapai karena akuntabel dan profesional dalam tata kelola keuangan," terangnya di sela kunjungan kerja dengan sejumlah perwakilan kabupaten/kota di Gedung DPRD Jateng, Senin (27/2).

Meski demikian, pihaknya masih menerima adanya temuan BPK mengenai permasalahan dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Secara umum persoalan tersebut

di antaranya, kelebihan pembayarnya karena belum optimalnya pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan di



**MEMAPARKAN:** Ketua BAP DPD Abdul Gafar Usman (dua kiri) didampingi anggota Bambang Sadono dan Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, saat memaparkan pandangan disela kunjungan kerja di kantor DPRD Jateng, Senin (27/2). ■ Foto: Arixc Ardana

lapangan, hingga lemahnya pengawasan akuntansi sehingga ada uang kas daerah yang hilang.

"Kami berharap Inspektorat selaku pengawas internal, bisa lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan," katanya.

Ia memberi waktu 30 hari agar daerah memperbaiki administrasinya dan segera mengirim kepada kami dan BPK RI. "Pemerintah daerah harus komitmen untuk memperbaiki, agar tidak menjadi temuan

yang berulang-ulang," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPD RI asal Jateng Bambang Sadono. Dia berharap, pemda tidak perlu ragu dalam menyampaikan persoalan yang ada, terkait dengan tata kelola keuangan atau aset.

"Ada beberapa kategori persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh BPK kantor perwakilan dan harus diselesaikan di tingkat pusat. Jika ada informasi dari pemda, kita siap untuk membantu di tingkat pusat," pungkasnya. ■

rix-die